

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan, sebagaimana yang penulis tulis sebelumnya pada Bab III dan uraian pada Bab sebelumnya. Maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Nagari Aia Manggih, dalam menetapkan penerima BLT Dana Desa COVID19 bisa dibilang belum efektif. Hal ini dikarenakan sinkronisasi data nagari mengenai jumlah warga yang masih berantakan, dimana pada profil nagari tercatat jumlah Kartu Keluarga ada 3.487 warga, jumlah warga yang sudah dapat bantuan dan PNS sudah melebihi data di profil nagari yaitu 4.001 warga. Dimana pada tahap awal itu pihak nagari melakukan pemilihan untuk memisahkan warga yang sudah menerima bantuan sosial sebelumnya, demi menghindari adanya penggandaan warga yang menerima BLT Dana Desa COVID19. Sehingga disini dapat dikatakan bahwa pengupdetan data penduduk di profil nagari tidak dilakukan secara berkesinambungan.
2. Tahapan dilanjutkan dengan melakukan musyawarah nagari untuk mencapai kesepakatan kriteria yang bisa digunakan sebagai pedoman penerima BLT Dana Desa COVID19. Musyawarah dilakukan guna mencari kriteria kemiskinan yang cocok dengan kondisi masyarakat Nagari Aia Manggih sehingga bisa dikategorikan sebagai penerima BLT Dana Desa COVID19.

Namun disini terjadi perubahan kriteria pada BLT Dana Desa Tahap 1 di tahun 2020 dan BLT Dana Desa Tahun 2021, kriteria diubah untuk mengeliminasi warga dari yang sebelumnya 266 warga menjadi 164 warga.

3. Mekanisme penetapan penerima BLT Dana Desa COVID19, diakhiri dengan mengirim tim untuk melakukan verifikasi, untuk memastikan bahwa warga yang terdaftar memang sesuai dengan kriteria yang telah disepakati sebelumnya. Walaupun dari pernyataan informan, mereka tidak ada ditemui sebelumnya sehingga disini bisa dikatakan bahwa verifikasi tidak merata dilakukan seluruhnya.
4. Tindakan afektif sebagai tindakan yang awalnya muncul dicoba untuk dijadikan sebagai suatu tindakan yang rasional, demi melegalkan calon penerima BLT Dana Desa COVID19.
5. Penerima BLT Dana Desa COVID19 di Nagari Aia Manggih terdiri atas enam kriteria yaitu 1) warga yang terdampak sebagai kriteria yang pertama kali digunakan dalam pembagian BLT Dana Desa tahap pertama; 2) lansia 60 ke atas; 3) sakit menahun atau kronis; 4) pekerjaan tidak tetap; 5) penyandang disabilitas; 6) banyak tanggungan, yang pada kriteria 2 sampai 6 digunakan sebagai pedoman dalam pembagian BLT Dana Desa tahap ke dua dan ke tiga.
6. Pertentangan yang muncul dalam penerimaan BLT Dana Desa terjadi karena data pusat tidak mampu mengidentifikasi sasaran untuk BLT Pusat dan tidak mengenali konteks dari situasi warga yang dianggap eligible. Sehingga terjadi rasa keberatan pada pihak yang merasa pantas menerima, namun secara kriteria

tidak memenuhi, karena dalam konteks “bansos” seseorang bisa menjadi klien dalam banyak setting.

7. Luasnya kriteria yang digunakan sebagai acuan bagi penerima bantuan sosial cenderung mendorong tindakan afektif bagi masyarakat, sehingga masyarakat cenderung merasa senasib dengan masyarakat yang masuk sebagai kriteria penerima bantuan sosial. Tindakan tersebutlah yang kemungkinan mendorong timbulnya protes-protes atau tuntutan klarifikasi dari masyarakat kepada pihak nagari setempat.

4.Saran

Musyawarah yang dilakukan Nagari Aia Manggih dalam menetapkan siapa penerima BLT Dana Desa COVID19 secara garis besar sudah bisa dikatakan tepat sasaran. Namun, dikarenakan bedanya cara masyarakat memaknai bermacam kriteria penerima bantuan sosial memunculkan timbulnya protes-protes kecil dari masyarakat terhadap nagari. Sebagai tambahan penulis ingin memberi saran, dan penulis harap bisa berguna untuk proses bantuan sosial kedepannya;

1. Pada penetapan kriteria kemiskinan sebaiknya nagari lebih spesifik lagi dalam mengkategorikannya dan ada baiknya selalu mengupdate secara berkala data kependudukan serta perkembangan ekonomi masyarakat. Sehingga masyarakat yang menerima bantuan bisa lebih tepat sasaran untuk semua bantuan yang dianggarkan oleh nagari atau desa maupun daerah dan pusat.

2. Masyarakat diharapkan lebih bertindak rasional dalam menanggapi persoalan penerima bantuan sosial dan tidak mudah terprovokasi dengan info yang belum jelas atau yang belum dikeluarkan secara resmi oleh pemerintahan setempat. Serta senantiasa juga dalam bekerja sama dengan pemerintahan nagari untuk memberikan kondisi terbaru seperti adanya pembaruan Kartu Keluarga, surat pindah, dan sebagainya.

